

Analisis Pemetaan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dari Perspektif Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

FAJAR UTAMA RITONGA

Program Studi Kesejahteraan Sosial, FISIP USU
Jalan Prof. A. Sofian No. 1, Kampus USU, Medan 20155
Email: fajar.utama@usu.ac.id

AGUS SURIADI

Program Studi Kesejahteraan Sosial, FISIP USU
Jalan Prof. A. Sofian No. 1, Kampus USU, Medan 20155
Email: agus4@usu.ac.id

HERI ISWORO

Dinas Sosial, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara
Jalan Simanunggir, Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sosopan-Kotapinang 20146
Email: heri.isworo@gmail.com

ABSTRAK

Pentingnya pemetaan sosial dalam rangka pencegahan, pemberdayaan dan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan agar program-program pencegahan, pemberdayaan, penanganan dan bantuan sosial dapat tepat tujuan yaitu Sejahtera sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. Tujuan penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisa masalah, potensi dan sistem sumber Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang disebabkan oleh Kemiskinan dan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif dengan pendekatan kajian Pustaka, pengumpulan data sekunder dilakukan di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Labuhanbatu Selatan, jurnal, buku yang berkaitan dengan kemiskinan, indeks Pembangunan manusia, masalah sosial, potensi, dan sistem sumber kesejahteraan sosial. Analisa data dilakukan dengan Teknik Analisa Strength, Weakness, Oppourtunity, Threatmen. (S.W.O.T) Kesimpulan dalam penelitian ini adalah masalah sosial yang paling banyak dialami oleh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah masalah kemiskinan yaitu: Rumah Tangga Miskin sehingga bantuan-bantuan seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial Tunai menjadi utama dalam pengerjaan nya. Program Pencegahan, Pemberdayaan dan Penanganan belum dilakukan maksimal oleh pekerja sosial, Dinas Sosial, serta Lembaga Swadaya Masyarakat, Selain itu Kaupaten Labuhanbatu Selatan juga memiliki Potensi dan Sistem Sumber Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang dapat digunakan dalam pencegahan, penanganan dan pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dengan memanfaatkan Tiga elemen yaitu Pemerintah, Swasta dan Perusahaan dalam rangka Pembangunan sosial guna menciptakan kesejahteraan sosial bagi Masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Kata kunci: pemetaan sosial, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, pekerja sosial

ABSTRACT

The importance of social mapping in the context of prevention, empowerment and handling of Social Welfare Services (PPKS) in Labuhanbatu Selatan Regency so that prevention,

empowerment, handling and social assistance programs can be right on purpose, namely Prosperity as mandated by Law Number 11 of 2009 The purpose of this research is to identify and analyse problems, potential and source systems for Social Welfare Services caused by Poverty and the low Human Development Index in Labuhanbatu Selatan Regency. The research method used is Descriptive Qualitative with a literature review approach, secondary data collection is carried out at the Central Statistics Agency (BPS) of South Labuhanbatu Regency, journals, books related to poverty, human development index, social problems, potential, and social welfare source systems. Data analysis was carried out using the Strength, Weakness, Oppourtunity, Threatmen Analysis Technique. (S.W.O.T) The conclusion in this study is that the social problem most experienced by the Government of Social Welfare Services (PPKS) is the problem of poverty, namely: Poor Households so that assistance such as the Family Hope Programme, Cash Social Assistance becomes the main work. Prevention, Empowerment and Handling Programmes have not been carried out optimally by social workers, Social Services, and Non-Governmental Organisations, In addition, Labuhanbatu Selatan Regency also has the Potential and Source System of Social Welfare Service Providers that can be used in the prevention, handling and empowerment of Social Welfare Service Providers by utilising Three elements namely Government, Private and Companies in the context of social development in order to create social welfare for the Community in Labuhanbatu Selatan Regency.

Keywords: *social mapping, social welfare service providers, social workers*

PENDAHULUAN

Masalah-masalah sosial yang timbul saat ini di masyarakat tidak terlepas dari kemiskinan. Sebagian besar 26 jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) diakibatkan oleh kemiskinan, terlepas dari faktor-faktor penyebab dan jenis-jenis kemiskinan yang dialami individu, kelompok ataupun masyarakat yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Hal tersebut pula yang dapat menjadi cikal bakal patologi sosial di masyarakat baik berskala mikro, mezzo maupun makro yang membutuhkan Pencegahan, Penanganan dan Pemberdayaan dari Pekerja Sosial baik yang bekerja di instansi Pemerintah, Swasta (Perusahaan), maupun Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Berdasarkan Hasil Penelitian diketahui bahwa rata-rata sebelum pemekaran 2003-2008 di labuhanbatu aspek sosial (tenaga kerja, jumlah sekolah dan jumlah pusat kesehatan), aspek ekonomi (jumlah industri besar dan sedang), aspek infrastruktur (jumlah panjang jalan, dan jumlah daya terpasang listrik) lebih besar dibandingkan dengan setelah pemekaran 2009-2014 di Labuhanbatu Selatan. Berbeda hal dengan aspek ekonomi (PDRB perkapita berdasarkan harga berlaku) memiliki rata-rata sebelum pemekaran lebih rendah dari pada setelah pemekaran. Sedangkan dengan menggunakan alat analisis uji t-test disimpulkan bahwa ada perbedaan secara signifikan sebelum pemekaran (2003-2008) di Labuhanbatu pada aspek sosial (tenaga kerja, jumlah sekolah, jumlah pusat kesehatan), aspek ekonomi (PDRB perkapita berdasarkan harga berlaku, jumlah indsutri besar dan sedang), infrastruktur (panjang jalan dan jumlah daya terpasang listrik) dengan setelah pemekaran (2009-2014) di Labuhanbatu Selatan. Dengan membandingkan tahun yang sama yaitu tahun 2009-2014, terjadi perbedaan yang positif. Dimana, terjadinya keberhasilan pemekaran dibandingkan sebelum pemekaran yaitu pada aspek ekonomi (PDRB perkapita berdasarkan harga berlaku dan jumlah industri besar dan sedang). Jika dibandingkan dengan Labuhanbatu 2009-2014, Labuhanbatu Selatan masih lebih tinggi. Sedangkan yang memeberikan dampak negatif yaitu pada aspek sosial (tenaga kerja, jumlah sekolah dan jumlah pusat kesehatan) dan infrastruktur (panjang jalan menurut kondisi dan jumlah daya terpasang listrik). Karena pembentukan daerah otonom baru tidak membuat labuhanbatu selatan sama atau lebih tinggi dari Labuhanbatu. (Zai, 2017)

Penelitian lainnya Pohan (2015) mengatakan bahwa bahwa Kabupaten Labuhanbatu Utara mampu bertumbuh kembang dengan pesat dan menempati peringkat 9 di wilayah Sumatera Utara dari 33 kabupaten/kota termasuk didalamnya Kabupaten Labuhanbatu Induk sebelum pemekaran tahun 2008. Perkembangan pembangunan di Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Utara atas dasar harga konstan pada tahun 2012 sebesar 6,37 persen. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan bila dibandingkan pertumbuhan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,21 persen. Laju pertumbuhan ekonomi per sektor pada tahun 2012 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Peningkatan IPM sejak tahun 2008 sebesar 72,08 menjadi 74,14 pada tahun 2011 dan meningkat lagi ditahun 2012 menjadi 74,92. Hal ini juga disertai dengan kenaikan peringkat IPM Kabupaten Labuhanbatu Utara menurut ukuran provinsi yang berada pada peringkat 17 di tahun 2010 menjadi peringkat 13 pada tahun 2012. (Pohan, 2015)

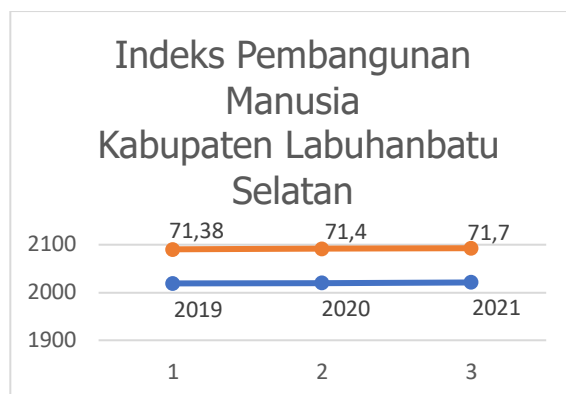
Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat terlihat jelas bahwa Kabupaten Labuhanbatu Utara lebih berkembang dan maju dibandingkan dengan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sejak pemekaran tahun 2008. Perbedaan hasil kajian mengenai pemekaran Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan Kabupaten Labuhanbatu Utara tersebut dapat menjadi kajian tersendiri dalam berbagai dimensi terutama ekonomi, sosial, budaya dan bidang ilmu lainnya. Pembangunan Infrastruktur yang dominan dilakukan tentunya memberikan efek positif dan negatif sebagai konsekuensi dari perkembangan suatu wilayah. Yang terluca dari pembangunan infrastruktur tersebut adalah masalah-masalah sosial yang ditimbulkannya. Untuk itu Kesejahteraan-Pekerjaan Sosial hadir sebagai jawaban dari masalah-masalah sosial yang disebut Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Permensos Nomor 5 Tahun 2019) melalui praktik profesi pekerja sosial di bidang Mikro, Mezzo, Makro sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial.

Tulisan ini mengulas keterkaitan antara kemiskinan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan pendekatan Kesejahteraan-Pekerjaan Sosial di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang relatif masih muda sejak terjadi pemekaran tahun 2008 (sekarang berusia 15 tahun) dari Kabupaten Labuhanbatu (Labuhanbatu Raya) menjadi Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu, dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

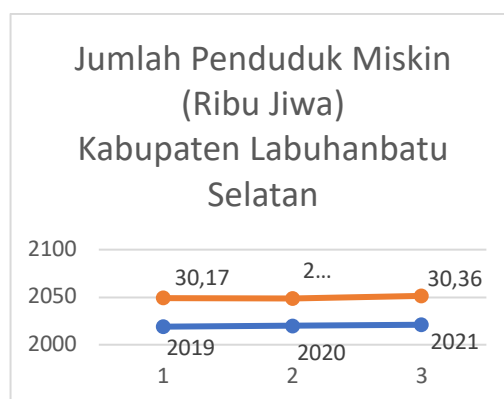
Dalam perspektif kesejahteraan-pekerjaan sosial ada sesuatu hal yang terlewatkan sejak pemekaran Kabupaten Labuhanbatu Induk tersebut. Dimensi yang penulis maksud adalah dimensi kebijakan sosial (*Social Policy*) mengenai pencegahan, pemberdayaan dan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang dominan dikarenakan faktor kemiskinan yang mengarah ke patologi sosial. Kebijakan sosial tersebut harus memperhitungkan konsep Pembangunan Sosial didalamnya yaitu menyelaraskan Pembanguann Ekonomi dan Pembangunan Sosial yang melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam tataran rung lingkup Mikro, Mezo dan Makro.

Patologi sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal. (Burlian, 2016).

Masalah sosial saat ini yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan kedepannya berpotensi menjadi patologi sosial yang akan berdampak pada perkembangan dan keberlanjutan pembangunan. Melalui Pemetaan Sosial, Analisa Masalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dari sudut pandang Pekerja Sosial sebagai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial. Sehingga pekerja sosial dapat menyumbang pemikiran dalam bentuk Analisa dalam pencegahan, pemberdayaan, serta penanganan yang tepat bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.



Gambar 1. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (BPS Labuhanbatu Selatan dalam Angka 2022)



Gambar 2. Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (BPS Labuhanbatu Selatan dalam Angka 2022)

Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, dalam arti semakin mendekati nilai 100, maka semakin bagus tingkat pembangunan manusia di daerah tersebut. Artinya semakin mendekati kondisi masyarakat sejahtera sesuai dengan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial Nomor 11 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa sejahtera adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Definisi tersebut tentunya terkait erat dengan Indeks Pembangunan Manusia untuk mencapai kondisi sejahtera menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. Penetapan Indeks Pembangunan Manusia dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Penetapan Ukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

No	Kategori	IPM
1	Rendah	<50
2	Sedang	50-80
3	Tinggi	>80

Sumber: <https://www.statmat.net/indeks-pembangunan-manusia-ipm/>

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam angka 2022 dan penetapan ukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka dapat dikatakan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Labuhanbatu Selatan berada ditingkat sedang (71,7). Kedepannya, hal ini tentunya dapat lebih ditingkatkan lagi jika kita melihat grafik dari tahun ke tahun mengenai Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (2019-2021). Usaha dan strategi peningkatan tersebut tidak dapat

terlepas dari Peran Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya yang telah dilakukan selama ini. Sumbangan dari Pekerja Sosial Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna, Remaja Masjid, juga menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian ini.

Kontradiktif dalam tulisan ini mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kaitannya dengan kemiskinan dikarenakan dari beberapa studi mengatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia tidak memiliki keterkaitan dengan kemiskinan. Maulana dkk (2022) mengatakan bahwa kemiskinan berpengaruh dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017. Variabel kemiskinan menunjukkan koefisien 0,34 artinya jika terjadi kenaikan kemiskinan sebesar 1 persen maka akan menurunkan IPM sebesar 0,34 persen di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan hasil lain menunjukkan bahwa kondisi ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian (Pinem, dkk 2023) yang mengatakan bahwa dalam jangka Panjang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. (Pinem, dkk, 2023). Artinya. Jika Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditingkatkan tidak serta merta mengentaskan kemiskinan di Sumatera Utara.

Penulis tidak sependapat dengan hal tersebut dikarenakan masalah-masalah sosial yang ditimbulkan erat kaitannya dari dampak kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia yang rendah sehingga banyak warga negara yang tidak berdaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Menurut pandangan penulis Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi antara satu sama lain. Indeks Pembangunan Manusia dapat menjadi cerminan kemiskinan di satu daerah ataupun negara sebagai gambaran dari Pembangunan manusia dilokasi tersebut. Tujuan penulisan artikel ini adalah mengidentifikasi dan Analisa Permasalahan Sosial disebabkan kemiskinan serta Upaya menanggulangnya di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara, dari sudut pandang Kesejahteraan-Pekerja Sosial.

METODE PENELITIAN

Tujuan dari tulisan ini adalah identifikasi melalui pemetaan sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang disebabkan faktor kemiskinan dan menganalisa sistem sumber pelayanan kesejahteraan sosial (formal, informal dan non formal di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam upaya pencegahan, pemberdayaan, dan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang didominasi faktor kemiskinan melalui pemberdayaan partisipatoris. Penulis berusaha untuk meninjau upaya apa saja yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Pekerja Sosial Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi Masyarakat yang memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan baik dalam pencegahan, Pemberdayaan dan Penanganan ti level mikro, mezzo, makro dari sudut pandang kesejahteraan-pekerjaan sosial. Sehingga penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu suatu metode yang menyebarkan data kualitatif secara deskriptif. kualitatif adalah cara yang dilakukan untuk menghasilkan data dengan bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari beberapa faktor yang diamati. Hal tersebut dipilih oleh penulis karena sesuai dengan penelitian Analisa Pemetaan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dari perspektif Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera

Utara. Indonesia. Penelitian kualitatif deskriptif adalah gabungan dari penelitian kualitatif. (Creswell, 2012).

Penulis menggunakan studi kepustakaan atau studi literatur. Menurut Achmadi dan Narbuko (2005) penelitian studi literatur tidak diharuskan untuk secara langsung turun ke lapangan dan bertemu dengan responden. Pendekatan studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data-data untuk memenuhi kebutuhan penelitian yang diperoleh dari literatur, laporan-laporan, sumber pustaka atau dokumen. Tulisan ini dikembangkan dengan memperbanyak informasi dari berbagai sumber lalu membandingkannya dan membuat hasil atas data yang berhubungan dengan topik pembahasan. Kumpulan informasi atau data yang terkait dengan topik pembahasan pada artikel ini bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Data yang digunakan untuk menjadi sumber referensi dalam penulisan artikel berasal dari jurnal dan buku mengenai upaya menanggulangi permasalahan kemiskinan, permasalahan sosial, patologi sosial dalam perspektif pekerja sosial untuk melakukan pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan dalam level mikro, mezzo dan makro. Selanjutnya penulis menggunakan Teknik Analisa SWOT (Strength, Weaknes, Oportunity, Threatmen) untuk menganalisa data sekunder yang diperoleh mengenai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, potensi, sistem sumber formal, informal dan non formal yang dimiliki masyarakat, organisasi kemasyarakatan bentukan pemerintah, swasta, dan organisasi Masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk melakukan pemetaan sosial dan Analisa dari sudut pandang kesejahteraan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia, permasalahan kemiskinan memiliki sifat multidimensional yang berarti membutuhkan adanya penanganan berdasarkan beberapa aspek lain dari kemiskinan. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hari (2017) yang menyatakan bahwa kemiskinan merupakan konsep yang berdimensi ganda (multidimensional), yakni terdiri dari dimensi ekonomi, politik dan sosial-psikologis. Hal tersebut juga searah dengan pendapat Tjokrowinoto dalam Sulistiyani (2017:27) bahwa kemiskinan tidaklah hanya memiliki keterkaitan dengan kesejahteraan masyarakat melainkan juga berkaitan dengan permasalahan kerentanan (*vulnerability*), ketidakberdayaan (*powerless*), kurangnya peluang akses lapangan pekerjaan bagi masyarakat, penghasilan yang habis untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, tingginya angka ketergantungan, dan budaya kemiskinan yang diberikan oleh generasi sebelumnya dan masih diterapkan hingga saat ini. Kemiskinan dapat diukur melalui penetapan persediaan sumberdaya dengan penggunaan standar baku yang dapat disebut dengan garis kemiskinan (*poverty line*), cara tersebut dinamakan dengan metode pengukuran kemiskinan absolut.

Berdasarkan pendapat Hari (2017) mengungkapkan bahwa kemiskinan dalam hal sosial-psikologis mengarah pada kekurangan jaringan serta struktur sosial yang dapat meningkatkan produktivitas. Dimensi kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang menghambat kesempatan yang terdapat di masyarakat. Faktor penghambat dalam hal ini yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang seperti misalnya rendahnya pendidikan sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berada dari luar diri seseorang, kedua faktor tersebut mempengaruhi akses bagi seseorang yang berada dalam kategori miskin untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraannya. dalam Pratiwi (2022).

Sharp dalam Kuncoro (2004) dalam Pratiwi (2022) menyatakan bahwa terdapat beberapa penyebab dari timbulnya masalah kemiskinan, yakni (1) Terdapatnya perbedaan pola kepemilikan sumber daya sehingga menyebabkan tidak meratanya distribusi pendapatan,

(2) Terdapat perbedaan pada kualitas sumberdaya manusia, dan (3) Terdapatnya teori lingkaran setan kemiskinan (*Vicious Circle of Poverty*). Upaya penanggulangan kemiskinan sudah sejak lama dilakukan oleh berbagai pihak seperti pemerintah dengan mengeluarkan beberapa program-program yang dapat membantu mencukupi kebutuhan masyarakat. Program tersebut diantaranya yaitu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diberikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Indonesia Sehat (PIS) yang diberikan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan program-program lainnya yang ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin (Poluakan, 2019). Namun hal tersebut tentu tidak cukup untuk menanggulangi kemiskinan, mengingat kemiskinan tidak dapat dipandang hanya dari satu sisi saja karena merupakan suatu permasalahan yang kompleks karena tidak hanya terkait dengan ekonomi, melainkan juga sisi lainnya seperti kesehatan, pendidikan, politik, kelembagaan dan sebagainya (Haris, 2018). Oleh karena itu, dalam proses penanggulangan kemiskinan diperlukan suatu pendekatan yang tidak hanya berfokus pada individual tetapi juga perlu memperhatikan segi kultural, dan struktural di masyarakat (Poluakan, 2019) dalam (Pratiwi, 2022)

Hadirnya Undang-Undang Pekerja Sosial Nomor 14 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Sosial Tentang Standar Praktik Pekerja Sosial dalam menyikapi Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2019 Tentang 26 Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menjadi isu menarik dalam Perkembangan Kesejahteraan Sosial di Indonesia khususnya di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sebagai Kabupaten baru yang berdiri tanggal 24 Juni Tahun 2008 dari pemekaran Kabupaten Labuhanbatu tentunya memiliki masalah-masalah sosial yang utamanya disebabkan kemiskinan harus ditangani Oleh Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan khususnya, Masyarakat, *Non Government Organization* (NGO) dan Perusahaan sebagai bentuk hadirnya negara dalam memakmurkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pekerjaan sosial hadir sebagai sebuah profesi yang dilatarbelakangi oleh adanya peristiwa *black death* yaitu kematian massal akibat suatu wabah penyakit di Inggris pada abad ke-14 yang berdampak pada kondisi masyarakat yang menjadi miskin (Sitepu, 2017). Oleh karena itu, pekerja sosial sangat terkait dengan masalah kemiskinan, karena pekerjaan sosial lahir dari adanya masalah kemiskinan (Ishartono dkk, 2016). Pekerja sosial menjadi tenaga terdepan dalam mengatasi masalah kemiskinan (Ishartono dkk, 2016). dalam (Pratiwi, 2022).

Perbedaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Masalah data dalam penyaluran bantuan menjadi masalah urgent di Indonesia. Hal ini selalu menjadi masalah utama ketika Pemerintah melalui Kementerian atau Dinas terkait akan menyalurkan bantuan-bantuan pencegahan, pemberdayaan, utamanya dikarenakan kemiskinan seperti Bantuan Langsung Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan lainnya yang bersifat accidental ataupun terprogram. Demikian juga yang didapati di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menjadi masalah utama dalam penyaluran bantuan tersebut. Pemerintah Pusat mengambil data kemiskinan dengan indikator kemiskinan tersendiri dan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tanpa melibatkan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Organisasi Pemerintah Daerah lainnya sampai di tingkatan Desa ataupun Kelurahan. Akibatnya terjadi data yang tidak sesuai dengan tujuan bantuan, data ganda yang mendapat bantuan, dan yang tidak mendapatkan bantuan.

Pekerja Sosial mengambil peran penting dalam pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dilakukan selama beberapa tahun belakangan, di bawah naungan

Kementerian Sosial dengan melibatkan Pekerja Sosial untuk mengecek langsung ke rumah tangga sasaran, berkordinasi dengan kepala desa, lurah, kepala lingkungan dan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sehingga permasalahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat diselesaikan dengan bijaksana. Artinya data dari Badan Pusat Statistik tentang penduduk miskin digabungkan dengan data milik Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan melibatkan kepala Desa, Kepala Lingkungan, Lurah serta memvalidasi langsung rumah tangga sasaran penerima bantuan tersebut sehingga penyaluran bantuan dapat dilakukan secara efektif atau tepat sasaran.

Tabel 2. Analisis SWOT Permasalahan Kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Keterangan	Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
Permasalahan Kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan	1. Program pengentasan kemiskinan (Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dll berjalan dengan baik. 2. Bantuan PKH Tahun 2023 Tri Wulan 1 (Pos): 4.657 Kepala Keluarga. 3. Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2023 Tri Wulan 1: 1.790 Kepala Keluarga. 4. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT): Per Januari-Maret 2023 sebanyak 9.987 Kepala Keluarga	1. Kebanyakan program bersifat bantuan (uang dan barang) yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. 2. Monitoring dan Evaluasi program masih lemah perlu ditingkatkan
	Opportunity (Peluang)	Threats (Ancaman)
	Memanfaatkan tiga tungku (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha)	1. Kemiskinan dikarenakan bencana alam dan non alam. 2. Pengangguran terbuka dan terselubung berada pada usia produktif. 3. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per januari 2023 107.479 jiwa atau 34.428 Kepala Keluarga.

Sumber: Olahan Penulis.

Berdasarkan pada tabel di atas melihat permasalahan kemiskinan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan serta bantuan yang diberikan baik dari Pemerintah Pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan lainnya seperti Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sosial dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Serta Bantuan Sosial dari Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam bentuk barang dan uang sudah dijalankan secara baik, yang menjadi permasalahan adalah tingginya data kemiskinan yang tidak terdata secara baik oleh kementerian sosial dan penerima bantuan sosial yang ditetapkan oleh kementerian sosial tanpa melakukan kordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu menyebabkan kepala keluarga tidak mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) ataupun program lainnya.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi masalah penting untuk segera diselesaikan oleh Pekerja Sosial, data tersebut menjadi penting untuk program bantuan yang akan diberikan kepada Masyarakat. Tugas utama Pekerja Sosial yang bekerja sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di bawah naungan kementerian sosial yang bertugas disetiap kecamatan di Seluruh Indonesia sebagai ujung tombak perbaikan data penerima bantuan,

dan sebagai upgrade data serta monitoring dan evaluasi jika penerima bantuan sudah berdaya (terminasi).

Kurangnya kordinasi antara Dinas Sosial Kabupaten dengan Kementerian Sosial yang selama ini terjadi menjadi permasalahan utama dalam pengumpulan dan upgrading serta monitoring dan evaluasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Untuk itu Pekerja Sosial diharapkan dapat bekerjasama dengan Dinas Sosial dengan menjalankan prinsip-prinsip pekerja sosial seperti Broker dan Enabler, selain menjalankan prinsip-prinsip lainnya dalam bekerja.

Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terdapat 26 jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdapat beberapa jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang umumnya didominasi oleh kemiskinan.

Rumah Tangga Rawan Ekonomi, Pengemis, Penyalah Guna Napza, Anak Terlantar merupakan jenis-jenis yang didapat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Walaupun terdapat beberapa kasus Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya seperti Anak Berhadapan Hukum (ABH), Disfunction Ability namun jumlahnya tidak terdata dengan baik di Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan maupun organisasi masyarakat yang memberikan pelayanan kesejahteraan untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tersebut.

Tabel 3. Analisa SWOT Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Keterangan	Strength (Kekuatan)	Weak (Kelemahan)
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan	1. Terdapat Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM sebanyak 26 orang). 2. TKSK (5 Orang) 3. Pendamping PKH (28 orang) 4. Pendamping Sosial (3 orang) 5. Tanggap Bencana (Tagana 15 orang)	1. Sumber Daya Manusia yang lemah dibidang sosial. (pembuatan program, implementasi program dan monitoring evaluasi program) berdasarkan keilmuan sosial (kesejahteraan sosial) 2. Koordinasi dengan OPD terkait yang belum berjalan baik. 3. Sarana dan prasarana yang terbatas
	Oppurtinity (Peluang)	Threat (Ancaman)
	Memanfaatkan program-program kementerian dan Dinas Sosial yang ada untuk pencegahan, perlindungan dan pemberdayaan PPKS.	1. Belum terdata dengan baik PPKS yang mendapatkan bantuan sosial. 2. Pendatang dari kabupaten lain yang menjadi PPKS. 3. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per januari 2023 107.479 jiwa atau 34.428 Kepala Keluarga

Sumber: Olahan Penulis.

Jika melihat tabel sebelumnya identifikasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan kelemahan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait Sumber Daya Manusia baik secara kuantitas dan kualitas dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial, maka kemungkinan besar jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) akan meningkat untuk tahun tahun berikutnya, untuk itu perlu dirancang program yang bersifat sustainability (berkelanjutan) yang mampu meningkatkan

kemampuan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial yang bertujuan mengembalikan fungsi sosial sekaligus memberdayakan ekonomi keluarga.

Peran Dinas Sosial Mengatasi Masalah Sosial yang Mengacu Patologi Sosial di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai institusi mewakili bentuk hadirnya negara dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada rakyatnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mensejahterakan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Saat ini Peran yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan hanya sebatas pada provider pemberi data belum menjalankan sepenuhnya Pencegahan, Pemberdayaan, Penanganan (rehabilitasi sosial). Hal ini tentunya tidak terlepas dari keterbatasan anggaran, minimnya Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana pendukung dan faktor lainnya.

Tabel 4. Analisa SWOT Peran Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Keterangan	Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
Peran Pemerintah (Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan)	<ol style="list-style-type: none"> Lembaga Kesejahteraan Masyarakat Yayasan Medan Plus Kota Pinang. (Panti Rehabilitasi Sosial Narkoba) Yayasan Cahaya Putra Selatan (Panti Rehabilitasi Sosial Narkoba) 	<ol style="list-style-type: none"> Tidak ada kantor definitif. Kekurangan SDM yang memiliki keilmuan sosial. Sarana dan Prasarana yang belum memadai
	<p style="text-align: center;">Opportunity (Peluang)</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan MoU dengan Universitas Sumatera Utara yang memiliki Prodi Kesejahteraan Sosial. Membuka Rumah Perlindungan Sosial (RPS)/Laboratorium Kesejahteraan Sosial yang menjadi pusat penelitian kesejahteraan sosial di Labuhanbatu Selatan 	<p style="text-align: center;">Threat (Ancaman)</p> <ol style="list-style-type: none"> Semakin meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran Tindak kriminalitas Masalah sosial Patologis dan Non Patologis Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya Penyalahguna Narkoba semakin meningkat

Sumber: Olahan Penulis.

Permasalahan penyalahgunaan narkoba menjadi penting dibahas dalam tulisan ini, dikarenakan Sumatera Utara menjadi penyumbang nomor 1 penyalahguna narkoba di Indonesia dan di Sumatera Utara penyumbang paling banyak adalah Labuhanbatu (Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu, dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan).

“Penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) semakin mengkhawatirkan. Bahkan saat ini, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) yang menaungi tiga kabupaten yaitu Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, dan Labuhanbatu Selatan, menyebutkan bahwa Kabupaten Labuhanbatu menjadi juara 1 terkait banyaknya pecandu narkoba untuk Provinsi Sumatra Utara.” (Medanbisnisdaily, 2022)

Hadirnya Panti Rehabilitasi Sosial Narkoba di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat dimanfaatkan sebagai mitra Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu selatan dalam hal penanganan penyalahguna narkoba yang semakin tinggi dan segera memerlukan perhatian khusus di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Peran Pekerja Sosial di Bidang Mikro, Meso, dan Makro Melibatkan Partisipasi Masyarakat dan Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Kehadiran Pekerja Sosial sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun Tentang Standar Praktik Pekerja Sosial dapat menjawab permasalahan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat memanfaatkan pekerja sosial. Dalam hal ini, Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi. (Pasal 1 UU 14 Tahun 2019). Kompetensi yang dimiliki pekerja sosial dapat melakukan pencegahan, pemberdayaan dan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Salah satu bidang keterampilan yang wajib dimiliki pekerja sosial adalah pemberdayaan Masyarakat baik di level komunitas (kelompok) maupun masyarakat (*Community Organization and Community Development*), pelibatan partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam pemberdayaan baik di level komunitas maupun Masyarakat.

Tabel 5. Analisa SWOT Peran Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Keterangan	Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
Peran Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi masyarakat berpartisipasi aktif (karang taruna) 2. IPSM (Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat) 3. Organisasi kepemudaan lainnya (Pemuda Pancasila (PP), Ikatan Pemuda Karya (IPK), AMPI dll. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatas pada program yang sporadis dan filantropi 2. SDM yang minim dalam pembuatan program-program kesejahteraan sosial
	Opportunity (Peluang)	Threat (Ancaman)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborasi dan kolaborasi dengan dunia usaha dalam menjalankan Corporate Social Responsibility yang ada di Kabupaen Labuhanbatu Selatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi kepemudaan yang beraktivitas sebagai preman dengan meminta sumbangan

Sumber: Olahan Penulis.

Peran serta masyarakat dalam keterlibatan pembangunan sosial menjadi sangat penting. Secara teoretis, konsep partisipasi masyarakat dinyatakan dalam banyak cara. Peran pekerja sosial yaitu *enabler* (pemercepat), *broker* (perantara), *teacher/educator* (pendamping), *expert* (ahli dalam metode mikro, meso, makro), *social planner* (pencegahan, pemberdayaan, penanganan), *activist* (pemberdaya masyarakat dalam menuntut haknya), dan *advocat* (pendamping dalam bidang hukum) dapat dilakukan pekerja sosial dalam pencegahan, pemberdayaan dan penanganan masalah sosial yang ada dan berkembang di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Tentunya peran-peran pekerja sosial tersebut dapat dijalankan secara partial atau tumpang tindih antara satu dengan lainnya. Namun yang pasti pekerja sosial dapat melakukannya dalam ruang lingkup mikro, meso dan makro dengan mengedepankan

partisipasi masyarakat baik ditingkat lokal, komunitas maupun kelompok dan masyarakat lebih luas.

Efendi (2011) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah sebuah proses yang menyediakan individu suatu kesempatan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan publik dan merupakan komponen dalam proses keputusan yang demokratis. Pendapat ini, relatif mendekati tangga terakhir dari partisipasi menurut Arstein (1969), yaitu adanya kendali/kontrol dari masyarakat atas pembangunan yang mengenai atau dampaknya terkait dengan masyarakat. (Arstein, 1969) dalam Daniati, 2019)

Midgley membagi partisipasi masyarakat menjadi 2, berbasiskan kriteria partisipasi masyarakat menurut Resolusi United Nation Economic and Social Council tahun 1929. Dalam resolusi tersebut dinyatakan bahwa adanya partisipasi masyarakat itu perlu memenuhi kriteria: a) adanya keterlibatan orang-orang yang sukarela dan demokratis dalam sumbangsuhnya terhadap usaha /program pembangunan; (b) adanya penerimaan manfaat secara merata di kalangan masyarakat; dan c) pengambilan keputusan yang menyangkut penentuan tujuan, perumusan kebijakan dan perencanaan, serta penerapan program pembangunan sosial dan ekonomi. Dengan banyaknya potensi pemuda dan organisasi Masyarakat dan Pemuda di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat dimanfaatkan pekerja sosial sebagai modal sosial dalam Pembangunan sosial dan praktik pekerjaan sosial dalam memberdayakan masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Tabel 6. Analisa SWOT Peran Dunia Usaha di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Keterangan	Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
Peran Dunia Usaha di Kabupaten Labuhanbatu Selatan	1. Terdapat Perusahaan-Perusahaan Sawit berskala besar untuk Pemanfaatan dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (64 perusahaan). 2. Terdapat 134 Perusahaan besar dan kecil. 3. Perda Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang CSR (Perda Nomor 4 Tahun 2021 Tentang TJSP Kabupaten Labuhanbatu Selatan)	1. CSR belum dilakukan secara baik, hanya kegiatan filantropis dan parsial. 2. Belum ada forum CSR.
	Oppurtinity (Peluang) 1. Memanfaatkan dana CSR untuk membuat program sustainability bagi PPKS. 2. Memanfaatkan pekerja sosial yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Labuhan batu baik yang bekerja sebagai PNS maupun non ASN dibawah Kemensos yang ditempatkan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.	Threat (Ancaman) 1. Pengusaha tidak mau terbuka mengenai keuntungan dan dana CSR yang diberikan dan dijalankan. 2. Perusahaan membuat program masing-masing tanpa melibatkan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan menggunakan pihak perusahaan sebagai implementor "CSR".

Sumber: Olahan Penulis.

Melihat banyaknya perusahaan besar di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat digunakan Pekerja Sosial dalam menciptakan Pembangunan Sosial) gabungan ekonomi dan Sosial) dengan memanfaatkan peran sebagai broker dengan (Pemerintah, Masyarakat, & Dunia Usaha) Dalam Upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Di Bumi Santun Berkata Bijak Berkarya melalui dana-dana CSR

yang sudah memiliki payung hukum (Peraturan daerah nomor 4 Tahun 2021 Tentang TJSP Kabupaten Labuhanbatu Selatan).

Perusahaan besar seperti PT. Torganda, PTPN 2, Kebun Si-Sumut, PT. Nubika, merupakan perkebunan milik swasta dan pemerintah yang telah lama beroperasi dalam bidang penanaman dan pengolahan sawit sampai dengan produk turunannya. Selama beroperasi Perusahaan-perusahaan tersebut berkontribusi besar dalam kehidupan Masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Disamping keuntungan perusahaan yang didapat terdapat kerusakan lingkungan akibat dari operasional Perusahaan-perusahaan sawit tersebut.

Pembangunan Infrastruktur dan sosial dapat dimanfaatkan dengan manajemen pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* yang tentunya memiliki anggaran yang cukup besar setiap tahunnya, namun dalam pelaksanaannya Pembangunan infrastruktur hanya terbatas Pembangunan jalan dan jembatan yang juga digunakan oleh truk-truk pembawa sawit yang digunakan Perusahaan-perusahaan tersebut. Demikian juga program-program yang di klaim oleh Perusahaan hanya sebatas program hibah atau charity seperti program sunat masal, bantuan sembako, beasiswa kepada anak-anak sekitar Perusahaan. Program CSR tersebut belum dipahami secara menyeluruh yang terkait 3P (Profit, People, Planet) yang menciptakan sustainability keberlanjutan program yang memberdayakan masyarakat sekitar perkebunan.

Kesejahteraan Sosial-Pekerja Sosial dan Pembangunan Sosial

Pembangunan Sosial adalah gabungan antara Pembangunan ekonomi dan sosial yang menurut Midgley (1995) mendefinisikan pembangunan sosial sebagai suatu proses perubahan sosial yang terencana, yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai suatu keutuhan, di mana pembangunan ini dilakukan untuk saling melengkapi dengan dinamika proses pembangunan ekonomi. Dari definisi tersebut, Midgley tidak mendikatomikan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial. Sebab pembangunan ekonomi bertujuan untuk mempercepat mobilitas sosial dan ekonomi suatu masyarakat dengan atribut yang dinilai secara ekonomis, sedangkan pembangunan sosial bertujuan untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat di semua lembaga sosial.

Pekerja sosial dapat merancang program-program pencegahan, pemberdayaan dan penanganan dengan mengutamakan Dimensi Pembangunan Sosial yaitu menyelaraskan bidang ekonomi dan sosial, hal ini dapat dilakukan pekerja sosial jika semua elemen pendukung dapat diaktifkan terutama partisipasi masyarakat, sistem sumber formal, non-formal dan informal di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Hal ini diperkuat oleh pendapat (Drolet dan Sampson, 2014) yang mengatakan bahwa pembangunan sosial merupakan sebuah pendekatan yang unik karena menggabungkan berbagai unsur sosial dalam masyarakat untuk meningkatkan kapasitas individu, keluarga, masyarakat daripada hanya mengandalkan pembangunan ekonomi saja. Bukan berarti pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi merupakan dua entitas yang saling berlawanan, melainkan keduanya dibutuhkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Gray, 2006; Healy, 2008; Midgley, 1995, dalam Drolet dan Sampson, 2014). Dalam Sukma, 2015)

Konsep pembangunan sosial juga sering dipertukarkan dengan konsep kesejahteraan sosial. Karena dalam konsep kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat tidak hanya di ukur dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat (misalnya pendapatan, pendidikan, dan kesehatan), melainkan ketika masyarakat dapat mengelola masalah-masalah sosial (misalnya kemiskinan, kriminalitas, dll) dan meningkatnya peluang masyarakat dalam berpartisipasi (Midgley dalam Adivar dkk, 2010). Untuk melakukan hal tersebut, maka

dibutuhkan peningkatan kapasitas individu dan masyarakat. Dengan meningkatnya kapasitas individu dan masyarakat maka mereka akan mampu memenuhi kebutuhan dasar, mengelolah masalah-masalah sosial, dan mampu memaksimalkan peluang yang ada. Untuk itu, dalam mewujudkan tujuan pembangunan sosial diperlukan strategi yang dapat diterapkan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Midgley (1997) mengemukakan ada 3 (tiga) strategi utama yaitu:

1. Pembangunan Sosial melalui Individu (*social development by individuals*), di mana strategi ini bertujuan untuk membangun kemampuan individu-individu dalam masyarakat agar individu-individu tersebut bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhannya. Pendekatan ini lebihmengarang pada pendekatan individualis atau 'perusahaan' (*individualist or enterprise approach*);
2. Pembangunan Sosial melalui Komunitas (*Social Development by Communitites*), di mana dalam strategi ini masyarakat secara bersama-sama mengembangkan komunitas localnya. Pendekatan ini lebih dikenal dengan nama pendekatankomununitarian (*communitarian approach*); dan
3. Pembangunan Sosial melalui pemerintah (*Social Development by Government*), di mana lembaga-lembaga dalam organisasi pemerintahan melakukan atau menjalankan pembangunan social. Pendekatan ini lebih dikenal dengan nama pendekatan statis (*statist approach*) (Sukma, 2015).

Untuk mewujudkan Kabupaten Lebuhanbatu Selatan terentass dari kemiskinan dari sudut pandang kesejahteraan-pekerja sosial dapat menggunakan Konsep Pembangunan (Ekonomi dan Sosial) yang melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini meliputi Pencegahan, Pemberdayaan dan Penanganan yang dilakukan secara kolektif oleh pekerja sosial, masyarakat aktif, organisasi kepemudaan, karang taruna, pekerja sosial masyarakat serta Lembaga Swadaya Masyarakat Bersama dengan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain yang berkaitan seperti Dinas Tenaga Kerja dan lainnya.

Program-program peningkatan ekonomi dan sosial dapat memanfaatkan sistem sumber dan potensi kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pekerja Sosial dapat menjalankan peran Broker, dan *enabler* serta berkordinasi dengan Dinas Sosial, *Non Government Organization* serta memamnfatkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Tentunya dilengkapi kebijakan atau Peraturan Bupati sebagai payung hukum yang mengatur tentang program pengentasan kemiskinan dan Dinas Sosial sebagai mentor serta pekerja sosial sebagai pelaksana program kegiatan tersebut yang melibatkan partisipasi masyarakat, organisasi kepemudaan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai mitra.

SIMPULAN

Hasil pemetaan mengenai masalah sosial dan potensi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah yang paling dominan adalah Permasalahan kemiskinan serta penyalahgunaan narkoba yang membutuhkan perhatian dan penanganan serius dari berbagai pihak. Terdapat juga beberapa jenis dari 26 jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti anak terlantar, disfungsi ability (difabel) dan lainnya. Bantuan yang diberikan pemerintah umumnya seperti Program Keluarga Harapan dan bantuan sejenis lainnya kepada masyarkat miskin. Potensi yang dimiliki Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki sistem sumber dan potensi kesejahteraan sosial yang cukup dengan memanfaatkan Peran dari Dinas Sosial, *Non Government Organization* (NGO) yang

bergerak dibidang pembangunan dan kesejahteraan sosial serta Corporate Social Responsibility (CSR) dari Perusahaan-perusahaan kelapa sawit guna mendukung Pembangunan infrasturktur dan sosial di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi dan Narbuko. 2005. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara
- Arnstein, S. R. 1969. A Ladder Of Citizen Participation. *Journal of the American Planning Association*, Vol. 35, No. 4, pp.216 – 224
- Burlian, P. 2016. Patologi Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.
- BPS .2023. Labuhanbatu Selatan Dalam Angka. Dapat diakses di <https://labuhanbatuselatankab.bps.go.id/>, diakses pada 26 Februari 2023.
- Creswell, J. W. 2012. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Daniati, S. 2019. Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Perencanaan Penggunaan Dana Desa Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan di Desa Kesimantengah. *Jurnal: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*. JIAP Vol 5, No 2, pp 172-180, 2019. DOI: <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.005.02.6>
- Effendi. 2011. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat. Jakarta: Erlangga.
- Hari, A. M. A. 2018. Masalah Kemiskinan Suatu Tantangan Bagi Profesi Pekerja Sosial. *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*, 1(1).
- Maulana, R. dkk. 2022. Analisis Pengaruh Kemiskinan dan Kondisi Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017.: *MKG* Vol. 23, No.1, Juni 2022 (12 - 24) P-ISSN 0216-8138 | E-ISSN 2580-0183 Jurnal DOI: <https://doi.org/10.23887/mkg.v23i1.3930>.
- Pratiwi, S.A, dkk. 2022. Upaya Penanggulangan Permasalahan Kemiskinan Ekonomi Di Indonesia Melalui Perspektif Pekerja Sosial (*Efforts To All Over Economic Poverty Problems In Indonesia Through Social Workers Perspective*). *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* <https://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/39965>. <https://doi.org/10.24198/focus.v5i1.39965>
- Pinem, H.A etc. 2023. “Analysis of the Effect of the Human Development Index, the Open Unemployment Rate on the Poverty Rate in North Sumatra, 2004 – 2022”. *Indonesian Journal of Advanced Research (IJAR)*.Vol. 2, No. 5, 2023: 509–524. ISSN-E: 2986 - 0768 <https://journal.formosapublisher.org/index.php/ijar>. DOI: <https://doi.org/10.55927/ijar.v2i5.4140>
- Poluakan, M. V., Nurwati, Nunung. 2019. Peran Pekerja Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan Kultural di Indonesia. *Jurnal Sosio Informa*. 5 (03): 177-188
- Sukma, 2015. Strategi Pembangunan Sosial : Upaya Pengentasan Masalah Kemiskinan. Dapat diakses di: <https://sumbarprov.go.id/home/news/6010-strategi-pembangunan-sosial-upaya-pengentasan-masalah-kemiskinan>
- Zai, S.R. 2017. Dampak Pemekaran Kabupaten Labuhanbatu Selatan Terhadap Sosial, Ekonomi dan Infrastruktur di Labuhanbatu Selatan. Skripsi Sarjana Universitas Sumatera Utara. Di akses di <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/15144>.
- Pohan, Z.S. 2015. Analisis Dampak Pemekaran Kabupaten Labuhanbatu Utara 2008-2014 terhadap Perkembangan Pembangunan Kabupaten labuhanbatu Utara sesuai Dengan PP No. 129 Tahun 2000. *Jurnal: POLITIKA*, Vol. 6, No.2, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/10709/8497>

- Medanbisnisdaily, 2022. "Gawat! BNN: Labuhanbatu Juara 1 Kasus Narkoba di Sumut. Dapat diakses di: https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2022/07/21/158857/gawat_bnn_labuhanbatu_juara_1_kasus_narkoba_di_sumut/. Di akses pada 26 Februari 2023.
- Midgley, J. 2005. Pembangunan Sosial, Perspektif Pembangunan Dalam. *Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Standar Praktik Pekerja Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 Tentang 26 Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).